

Posisi Hongkong Dalam pembangunan Ekonomi Tiongkok

M. Iqbal

20130510512

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This article will throw light on the phenomenon of integration used by the State of Tiongkok as an attempt to defend Hong Kong as part of it. The integration that redefined as the assimilation or reunification of units separate from the state's role in international political economy makes integration as a negotiating tools for preventing conflict. In addition, integration becomes a tool that security-community as a transformation of interaction regime between countries in the world of mutual benefit. The policy of the Special Administrative Region became a political economic polemic for the Tiongkok and Hong Kong countries due to the different systems adopted. This becomes a contract for both countries to integrate without harming one another.

Keywords: Integration, Special Administrative Region, Country of Tiongkok, Hong Kong

Artikel ini akan menyoroti fenomena integrasi yang digunakan oleh Negara Tiongkok sebagai upayanya dalam mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagian didalamnya. Integrasi yang mendefinisikan ulang sebagai pembauran atau penyatuan kembali dari unit-unit yang terpisah dari peran negara dalam ekoomi politik internasional menjadikan integrasi sebagai alat negosiasi untuk mencegah terjadinya konflik. Selain itu, integrasi menjadi alat bahwa *security-community* sebagai transformasi rezim interaksi antara negara-negara di dunia yang saling menguntungkan. Kebijakan *Special Administrative Region* menjadi polemik ekonomi politik bagi Negara Tiongkok dan Hong Kong karena adanya perbedaan system yang dianut. Hal ini menjadi kontraprestasi bagi kedua Negara untuk melakukan integrasi tanpa merugikan satu dengan yang lain.

Keywords : Integrasi, *Special Administrative Region*, Negara Tiongkok, Hongkong

PENDAHULUAN

Hong Kong merupakan salah satu daerah yang muncul sebagai kekuatan ekonomi di Tiongkok, dimana dengan adanya efisiensi regulasi berupa kebebasan bisnis yang terlindungi dengan baik dalam kerangka peraturan yang efisien. Transparansi mendorong kewiraswastaan, dan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan dan operasi bisnis pemula. Kode ketenagakerjaan benar-benar ditegakkan untuk mendorong produktivitas. Hong Kong memiliki kontrol harga yang sangat rendah, akan tetapi terdapat beberapa dana subsidi, harga sewa dan harga perumahan sebagai penunjang untuk telekomunikasi, transportasi umum, dan listrik (Heritage Foundation, 2017).

Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah pusat bisnis,

perdagangan dan keuangan internasional. Dengan membangun kebijakan ekonomi pasar bebas tradisional, Hong Kong telah berkembang menjadi pusat ekonomi jasa modern yang dinamis dan kosmopolitan, yang mendukung peran kota sebagai platform bisnis global (Chan, 2017).

Hong Kong pada hakikatnya merupakan wilayah administrasi khusus dimana sebuah status administrasi ini muncul sebagai konsekuensi kebijakan dari Beijing (Satu Negara Dua Sistem) yang merupakan kebijakan politik khusus yang digagas oleh Deng Xiaoping untuk penyelesaian masalah status Hong Kong yang pada saat itu sedang dalam proses pengembalian kedaulatan dari Inggris kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang pada intinya

menekankan bahwa dalam naungan satu negara, Hongkong berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Tiongkok, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri, sedangkan bidang-bidang lain seperti yang sudah dijelaskan diatas seperti diantaranya mengenai perdagangan, mata uang, dan imigrasi seharusnya menjadi wewenang bagi wilayah penerima administrasi yang khusus, yaitu Hong Kong dan Macao (Guang, 2012).

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di negara Tiongkok, terdapat keistimewaan Hong Kong yang tidak didapatkan oleh wilayah lain di Tiongkok. Namun disamping itu terdapat fakta-fakta berupa kemajuan yang sangat pesat pada wilayah lain di negara Tiongkok, contohnya seperti

provinsi yang secara geografis berada dekat dengan Hong Kong yaitu Shanghai, Guangzhou dan provinsi lainnya. Kemajuan ekonomi dari beberapa wilayah ini juga berdampak pada pembangunan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Dilihat dari era dimana Hong Kong mengalami kemajuan yang sangat pesat, sebenarnya beberapa wilayah di Tiongkok juga mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor yang memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi Tiongkok.

Shanghai merupakan salah satu wilayah yang mengalami kemajuan ekonomi di Tiongkok, dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan kemajuan sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut. Shanghai mampu menggunakan potensi yang dimiliki sebaik mungkin, salah satunya yaitu

Shanghai menjadi kota pelabuhan tersibuk di dunia dalam hal penanganan kargo. Di sisi lain sektor industrinya makin berkembang sehingga mampu mengundang banyak investor asing untuk menanamkan investasinya (John L. Graham, 2007).

Guangzhou merupakan wilayah yang secara geografis berada sangat dekat dengan Hong Kong, Guangzhou merupakan salah satu wilayah yang terhitung maju di negara Tiongkok, melihat dari PDB Guangzhou yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan kemajuan dari berbagai sektor yang mendorong peningkatan pendapatan daerah (The People`s Government of Guangzhou Municipality, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir Guangzhou juga mengalami pertumbuhan PDB tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di

Tiongkok secara keseluruhan. Ekspansi yang cepat dari perspektif konsumen terhadap perubahan pusat kota dan Guangzhou keseluruhan mengalami tiga transformasi dalam jangka waktu lama, hal ini menyebabkan pasokan akan barang-barang hasil industri meningkat (Guangzhou Daily Luo Hua Lin , 2017).

Pada tahun 1982 Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher mengunjungi Tiongkok untuk melakukan perundingan mengenai status Hong Kong dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok selanjutnya membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam pasal 31 yang mengizinkan Hong Kong untuk menjadi SAR (*Special Administrative Regions*) atau Wilayah Administrasi Khusus.

Kemudian, terbentuklah deklarasi bersama antara Tiongkok

dengan Inggris pada tahun 1984 yang ditandatangani oleh PM Margareth Thatcher selaku perwakilan dari Inggris dan PM Zhao Ziyang selaku perwakilan dari Tiongkok. Deklarasi ini berisi beberapa poin penting diantaranya yaitu, Tiongkok akan mengakui kedaulatan khusus atas Hong Kong dihitung efektif sejak 1 Juli 1997, Hongkong akan menjadi SAR dan dapat memiliki otonomi yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok yang lain, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, dan pertahanan militer. Ranah-ranah yang menjadi kewenangan daerah administratif khusus Hong Kong adalah seputar pada bidang ekonomi dan hubungan budaya.

Dalam perkembangannya, sebuah negara tidak terlepas dari kejadian sejarah dari setiap daerah bagian didalamnya. Setiap sejarah

menjadi suatu bukti adanya proses yang dilalui oleh suatu daerah agar mendapatkan pengakuan. Hong Kong merupakan salah satu wilayah kolonial Inggris yang kemudian tergabung ke dalam negara Tiongkok, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah negara Tiongkok. Proses integrasi yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok adalah suatu upaya dalam mempertahankan Hong Kong agar tetap menjadi bagian dari wilayahnya.

Integrasi secara umum adalah pembauran dari unit-unit berbeda dan terpisah hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Rasional itu sendiri adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2017). Oleh karenanya, rasional integrasi diartikan sebagai pembauran dari unit-unit yang

berbeda menjadi satu kesatuan yang didasarkan pada pikiran dan pertimbangan yang logis.

SEJARAH HONG KONG

Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang banyak dikenal oleh seluruh dunia, tidak hanya dari bagaimana kemajuan yang dimiliki akan tetapi termasuk bagaimana proses perkembangan wilayahnya baik dari sisi politik, sosial dan terutama ekonomi. Sejarah Hong Kong, sebuah pelabuhan bisnis yang terletak di lepas pantai tenggara Eurasia. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak Zaman Batu Tua, dan kemudian dengan penggabungannya ke dalam kerajaan China selama dinasti Qin (221-206 SM). Dimulai sebagai desa nelayan nelayan dan lokasi produksi garam, Hong Kong kemudian berkembang

menjadi pelabuhan bebas penting dan akhirnya menjadi pusat keuangan internasional utama (Hong Kong Government, 2016).

Hong Kong sebagai suatu wilayah yang memiliki kebebasan otonomi yang sangat tinggi dan memiliki keistimewaan yang telah diberikan oleh Tiongkok. Kebebasan dan keistimewaan yang diberikan dari Tiongkok kepada Hong Kong ini merujuk kepada perkembangan dan sistem ekonomi Hong Kong yang sudah berjalan sejak Hong Kong menjadi daerah koloni Inggris (Hung, 2015).

Sejarah mula yang sangat berdampak terhadap kemajuan ekonomi Hong Kong adalah perang Candu. Perang Candu, Perang Opium berasal dari bahasa Tionghoa yaitu 鴉片战争 atau didalam karakter

tradisionalnya yaitu 鴉片戰爭 dan di penulisan pinyinnya yaitu Yāpiàn Zhànzhēng, juga disebut Perang Anglo-Tiongkok. Perang Candu merupakan dua perang yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 yang berlangsung dari tahun 1839 - 1842 dan 1856 – 1860, perang ini terjadi antara orang Tiongkok dan orang Inggris di kedaulatan Tiongkok. Pada perang tersebut pedagang Eropa menggunakan kekuatan adiktif candu untuk memperoleh hubungan dagang penting dengan Tiongkok, negara yang mengisolasi diri dari dunia luar (William Travis Hanes, 2002).

Nama “Candu” pada perang ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Dinasti Qing dan Inggris mengenai perdagangan Candu di daratan Tiongkok. Konflik bersenjata yang berlangsung dua kali di

Tiongkok sekitar pertengahan abad ke-19 antara kekuatan negara-negara barat dan Dinasti Qing (1644-1912) yang memerintah Tiongkok Meskipun perang opium pertama dimulai pada tahun 1839, "tembakan pertama" dalam konflik terjadi hampir setengah abad sebelumnya, ketika utusan Inggris ke kaisar Qianlong, custom yang diterima oleh setiap negara lain yang melakukan bisnis dengan pasar besar Tiongkok (William Travis Hanes, 2002).

Perang Opium terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860 menandai sebuah tahap baru dalam hubungan China dengan Barat. Kekalahan militer China dalam perang ini memaksa para penguasa untuk menandatangani perjanjian yang membuka banyak pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Pembatasan yang diberlakukan di bawah sistem

Kanton dihapuskan. Opium, meski ada larangan kekaisaran, kini menjadi barang biasa. Saat opium membanjiri China, harganya turun, konsumsi lokal meningkat dengan cepat, dan obat tersebut menembus semua lapisan masyarakat. Di pelabuhan-pelabuhan perjanjian baru, pedagang asing berkolaborasi dengan beragam pedagang Cina yang lebih banyak daripada di bawah sistem Kanton, dan mereka berkelana jauh ke dalam interior Cina. Misionaris membawa ajaran Kristen kepada penduduk desa, dilindungi oleh hak diplomatik yang diperoleh berdasarkan perjanjian. Permusuhan yang populer pada orang asing baru mulai meningkat.

Tidak mengherankan, sejarawan China menganggap kedua Perang Opium sebagai pemaksaan kekuasaan asing yang tidak adil

terhadap kerajaan Qing yang melemah. Pada abad ke-20, Republik China melakukan upaya keras untuk menghapus apa yang disebutnya "perjanjian yang tidak setara." Ini berhasil menghapus sebagian besar dari mereka dalam Perang Dunia II, namun fase imperialisme asing ini berakhir sepenuhnya dengan kembalinya Hong Kong ke Cina pada tahun 1997. Buku teks konvensional bahkan menandai dimulainya sejarah Cina modern dari akhir Perang Opium pertama di tahun 1842 (Perdue, 2011).

Sebagai klimaks dari sengketa perdagangan antara Tiongkok dibawah Dinasti Qing dengan Inggris. Penyeludupan opium Inggris dari India ke Tiongkok dan usaha pemerintah Tiongkok menerapkan hukum obat-obatannya menyebabkan konflik militer. Inilah beberapa hal yang sangat

berpengaruh terhadap munculnya perang Candu dan menjadi faktor Hong Kong menjadi daerah kolonial Inggris. Sehingga pada akhirnya Tiongkok kalah dalam peperangan dan harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris sebagai salah satu wilayah kolonial.

KEBIJAKAN *ONE COUNTRY TWO SYSTEM*

One Country Two System merupakan kebijakan administrasi yang dianut oleh Tiongkok setelah kebijakan administrasi *One China Policy*. Kebijakan administrasi *One China Policy* dalam bahasa Mandarin yaitu “一个中国政策” (Yi Ge Zhong Guo Zheng Che) yang berartikan Satu Tiongkok, harga mati bagi Tiongkok bahwa Taiwan masih berada di bawah teritori China dan negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut serta mengakui posisi

Tiongkok bahwa dengan hanya memilih satu pemerintahan apabila ingin tetap bekerjasama dengan Tiongkok.

Kebijakan ini merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa Taiwan dan Tiongkok daratan adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu “Tiongkok” (Chiang, 2004). Akan tetapi pada konsensus tahun 1992 terdapat modifikasi dari *kebijakan One China Policy* yang lebih tergantung kepada partai politik utama yang berkuasa. Prinsip ini mendapat perlawanan dari masyarakat Taiwan (Pendukung Gerakan Kemerdekaan Taiwan) yang mendorong untuk mendirikan “*Republic Of Taiwan*” dan menumbuhkan identitas terpisah dengan Tiongkok daratan yang disebut “*Taiwanization*”. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pihak

pemerintahan berusaha untuk mencari menyatukan kembali dengan merumuskan kebijakan baru *One Country Two System ini*.

“One Country Two System”

dalam bahasa Mandarin yaitu 一国两制 (Yi Guo Liang Zhi) yang berartikan satu negara dua sistem adalah sebuah kebijakan baru yang diadopsi pada tahun 1970 an dan pertama kali dirumuskan oleh Deng Xiaoping dengan tujuan penyatuan negara Tiongkok secara damai pada tahun 1980 an. Deng Xiaoping pada masanya sebagai kepala negara Tiongkok menyarankan bahwa adanya satu negara dua sistem sebagai salah satu bentuk yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah satu, namun wilayah Tiongkok yang berbeda seperti Taiwan, Hong Kong dan Macau dapat mempertahankan sistem ekonomi dan

administrasi mereka sendiri, sementara wilayah lain di negara Tiongkok masih menggunakan sosialisme dengan sistem karakteristik Tiongkok. Berdasarkan dengan diterapkannya kebijakan ini, ketiga wilayah tersebut dapat terus memiliki sistem pemerintahan sendiri, urusan hukum, ekonomi dan keuangan, politik dan termasuk hubungan dagang dengan negara-negara asing (Yang, 2014).

Kebijakan administrasi ini muncul diakibatkan adanya dua prinsip atau ideologi yang berbeda. Tiongkok daratan merupakan satu wilayah yang memiliki sistem sosialis, sedangkan Taiwan dan Hong Kong merupakan wilayah yang memiliki sistem kapitalis. Untuk menyatukan kembali beberapa wilayah ini, Tiongkok tidak bisa menginterfensi dengan cara pemaksaan untuk kembali dan menggunakan

sistem sosialos seperti beberapa wilayah bagian yang ada diTiongkok daratan. Dengan kondisi yang berbeda, Tiongkok harus mencari celah untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagianyang sudah terpisah dengan tidak mengganti sistem yang sudah diterapkan. Namun walaupun dengan dirumuskannya kebijakan administrasiini bukan berarti kebijakan Tiongkok sebelumnya yaitu *One China Policy* dihapuskan, kebijakan satu Tiongkok ini masih aktif sampai sekarang ini dan di tambah oleh kebijakan *One Country Two System*.

IMPLIKASI KEBIJAKAN *ONE COUNTRY TWO SYSTEM* BAGI WILAYAH DI TIONGKOK

Untuk mewujudnya reunifikasi Tiongkok adalah aspirasi umum oleh semua masyarakat Tiongkok baik dalam negeri maupun luar negeri. Partai komunis Tiongkok dan

pemerintah Tiongkok bekerjasama dalam menyelesaikan reunifikasi ini demi tercapainya tujuan Tiongkok sebagai negara kesatuan. Pada tahun 1950 pemerintah Tiongkok mengajukan proposal damaikepada Taiwan, kemudian di tahun 1955 Perdana Menteri Zhou Enlai menyatakan bahwa “orang-orang Tiongkok bersedia, jika ada persyaratan, untuk membebaskan Taiwan dengan cara-cara damai”.

Selain itu, dari perspektif hubungan internasional, Selat Taiwan, salah satu zona konflik yang paling mungkin terjadi di wilayah Asia-Pasifik, telah dijuluki sebagai "Semenanjung Balkan di Timur." Taiwan-Tiongkok, atau selat silang, menjadikan situasi semakin parah oleh lokasi geo-strategis utama Taiwan, yang telah menyebabkan kedaulatan di

pulau ini tetap menjadi isu paling sensitif dalam hubungan Tiongkok-Amerika Serikat (Hsieh, 2009).

Integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam tujuan reunifikasi ini tidak berjalan dengan lancar dan apa yang diupayakan oleh Tiongkok tidak berhasil. Taiwan tidak menerima tawaran dari Tiongkok walaupun dijadikan wilayah administratif khusus. Taiwan pada saat sekarang ini telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi wilayah bagian dari negara Tiongkok, dimana semua sistem pemerintahan, ekonomi, militer, uang yang berlaku dan luar negeri diatur oleh pemerintahan Taiwan itu sendiri.

Berdasarkan komitmen pemerintah Tiongkok paska Deng Xiaoping untuk melanjutkan reformasi ekonomi dan integrasi lebih lanjut dari Tiongkok ke dalam ekonomi dunia,

sangat tidak mungkin pemerintahan Tiongkok akan mengambil kebijakan yang diketahui akan membahayakan ekonomi Hong Kong yang kuat. Pada waktu Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok di akhir 1970an, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Tiongkok akan menjalankan konsep kebijakan One Country Two System dimana Hong Kong akan berada di bawah kedaulatan Tiongkok, namun Hong Kong akan tetap bisa mempertahankan identitasnya, menjalankan sistem yang berbeda terutama sistem ekonomi yang berorientasi pasar terbuka dan gaya hidup yang berbeda (Sherlock, 1997).

Mungkin perbedaan paling signifikan antara Cina daratan dan Hong Kong adalah bahwa daratan adalah komunis sementara Hong Kong memiliki demokrasi yang terbatas.

Keduanya berbagi Presiden Cina sebagai kepala negara mereka. Namun, masing-masing memiliki kepala pemerintahan sendiri: Premier adalah kepala Cina daratan, sedangkan Kepala Eksekutif adalah kepala Daerah Administratif Khusus Hong Kong.

PROSES NEGOSIASI ANTARA HONG KONG DAN TIONGKOK

Integrasi yang terjadi antara Hong Kong dan Tiongkok merupakan satu bentuk penyelesaian permasalahan berupa perbedaan prinsip ataupun sistem yang diterapkan, sehingga muncul suatu kendala dalam penyatuan kembali kedua komponen ini. Walaupun demikian, Tiongkok berusaha menawarkan berbagai hal sebagai bentuk negosiasi dengan Hong Kong termasuk pemerintahan Inggris yang masih memiliki hak untuk menentukan Hong Kong pasti atau

tidak akan kembali ke pangkuan Tiongkok.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Hong Kong yaitu Tiongkok akan menjalankan kebijakan *One Country Two System* dan SAR sebagai salah satu bentuk praktek dalam pelaksanaannya. Konsep ini merupakan salah satu cara negosiasi yang dilakukan oleh Tiongkok agar Hong Kong menerima tawaran dari Tiongkok untuk bergabung kembali dan berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Berkaitan dengan pasal 31 yang menyediakan dasar konstitusional untuk pembentukan wilayah administratif khusus yang memiliki perbedaan sistem sosial dan kebijakan berbeda dengan wilayah lain di Tiongkok, dikarenakan tujuan reunifikasi damai yang menjadi

kepentingan Tiongkok. Setelah penyelidikan dan penelitian mendalam, pemerintah China merumuskan 12 kebijakan dasar mengenai pertanyaan Hong Kong, yang dikenal sebagai "12 Prinsip" pada awal 1983. Isi dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Tiongkok berupa pemerintah Tiongkok meresmikan kedaulatan Hong Kong pada tanggal 1 juli 1997, setelah pelaksanaan kedaulatan Hong Kong akan menjadi wilayah administrasi khusus di Tiongkok, Hong Kong akan berada di bawah wewenang pemerintah Tiongkok dan akan menikmati otonomi tingkat tinggi, seperti sistem pemerintahan akan diurus sendiri oleh penduduk asli Hong Kong.

Sistem sosial dan ekonomi saat ini di Hong Kong akan tetap tidak berubah, dan begitulah gaya hidup. Kebebasan, termasuk pidato, pers,

perakitan, asosiasi, perjalanan, pergerakan, korespondensi, dan kepercayaan religius akan dipastikan di Hong Kong. Kepemilikan pribadi, kepemilikan perusahaan, hak sah warisan dan investasi asing akan dilindungi undang-undang. Hong Kong tetap menjadi pelabuhan bebas, dan pusat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara asing. Dengan menjadi wilayah bagian dari Tiongkok, Hong Kong akan lebih leluasa dalam menjalankan beberapa kerjasama baik pemerintah, organisasi, budaya dan lainnya dengan wilayah bagian Tiongkok lainnya. Pemeliharaan ketertiban umum di Hong Kong akan menjadi tanggung jawab pemerintah Hong Kong. Semua kebijakan yang disebutkan dan dijelaskan di atas akan diatur dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong oleh NPC Tiongkok dan akan memiliki perubahan setelah 50

dari ditetapkannya Hong Kong sebagai wilayah administrasi khusus (Yang, 2014).

Negosiasi ini berlangsung secara damai, jika ada pertikaian diantara kedua belah pihak maka diadakan kompromi yang mana bertujuan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama yang dilakukan. inilah hal serupa yang terjadi diantara Hong Kong dan Tiongkok dimana antara kedua komponen ini mampu mempertahankan kerjasama jangka panjang walaupun dalam praktek pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan. Negosiator Hong Kong akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada tahap perundingan, dimana ini menandakan bahwa Hong Kong sangat siap untuk menghadapi perundingan dan memiliki jalan tersendiri dalam

penyelesaian perbedaan pendapat. Seperti halnya Tiongkok yang ingin Hong Kong kembali ke pangkuannya, Hong Kong terlebih dahulu mendiskusikan rincian dan mengenai konsesi yang akan diterima oleh Hong Kong setelah bergabung kembali dengan Tiongkok.

Ketika perundingan antara Hong Kong, Tiongkok dan Inggris mengenai persoalan pengembalian Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, bahwa perundingan yang dilakukan membutuhkan waktu yang sangat lama, akan tetapi pelaksanaan perjanjian berlangsung sangat cepat sampai diresmikannya Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok. Adanya penawaran diantara kedua komponen terutama sesuai dengan 12 kebijakan dasar yang dikemukakan oleh Tiongkok dalam menjawab

pertanyaan Hong Kong sebagai bentuk konsesi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Hong Kong, sehingga ketika Hong Kong bergabung dengan Tiongkok, Hong Kong menjadi salah satu wilayah administratif khusus yang memiliki otonomi yang sangat tinggi.

Pengambilan keputusan Hong Kong dalam perundingan ini juga disertai dengan dorongan pihak lain, dimana Hong Kong itu sendiri berani mengambil resiko atas apa yang telah diputuskannya. Meskipun perjanjian sementara biasanya disimpan, jangan menganggapnya akhir. Mengenai perjanjian dan kontrak, kontrak akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang mengikat. Hong Kong dipengaruhi oleh dua pandangan yang sangat berbeda tentang peran perjanjian dan kontrak. Di satu sisi, posisi tradisional Tiongkok

adalah bahwa perjanjian hanyalah snapshot pada waktunya. Mereka memandang kontrak sebagai makalah yang mendokumentasikan maksud dari hubungan kerja pada saat mereka merayu dan menandatangani, bukan sebagai perjanjian akhir yang dapat bertahan dalam ujian litigasi. Di sisi lain, ada pengaruh Inggris, yang menentukan kontrak yang dianggap serius dan diikuti ke perjanjian dan penyuratan. Akibatnya, kontrak akhir biasanya dapat diandalkan, meskipun selalu bijaksana untuk memelihara hubungan Tiongkok dengan mitra Hong Kong secara berkelanjutan

Dengan dilakukan integrasi ini, Hong Kong pada akhirnya kembali ke pangkuan Tiongkok dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak serta adanya penyerahan secara resmi oleh pemerintah Inggris kepada

pemerintah Tiongkok. berdasarkan teori yang digunakan yaitu rasional integrasi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si. dimana Hong Kong bergabung dengan Tiongkok merasa rugi, akan tetapi terdapat konsesi bagi Hong Kong atas beberapa hal sehingga Hong Kong menerima negosiasi dari Tiongkok dan kembali kepangkuan Tiongkok secara damai.

KEUNGGULAN HONG KONG

Hong Kong memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi, kemajuan tersebut tentunya didukung oleh adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari beberapa sektor yang menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan ekonomi Hong Kong itu sendiri. Keunggulan sektor-sektor ekonomi Hong Kong adalah salah satu hal yang mendasari adanya kepentingan Tiongkok dalam meningkatkan pembangunan ekonomi

negaranya. Sektor-sektor ekonomi Hong Kong berkembang pesat dimulai dari era datangnya Inggris yang menjadikan Hong Kong sebagai daerah kolonialnya dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis di Hong Kong.

Berkembangnya Hong Kong sebagai pusat transit internasional didukung oleh majunya beberapa wilayah bagian Tiongkok timur yang juga memiliki peningkatan sangat baik dalam hal perdagangan dunia contohnya seperti Shanghai, Guangzhou, Xiamen dan wilayah bagian lainya, wilayah-wilayah bagian ini juga merupakan wilayah yang banyak dikunjungi oleh warga negara asing.

Pelabuhan Hong Kong merupakan salah satu pelabuhan utama di dunia, dimana pelabuhan ini menempati urutan ke empat dari kemampuan

menangani kargo setelah pelabuhan Shanghai, Singapura dan Shenchen. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa 3 dari wilayah bagian Tiongkok menduduki peringkat lima teratas. Pelabuhan Hong Kong memiliki kemampuan untuk menangani kargo sebanyak 20 juta TEUs, pelabuhan Hong Kong juga memiliki galangan kapal yang mampu untuk menangani kapal dengan kapasitas sampai 46.000 ton, Hong Kong memiliki beberapa pelabuhan yang mana setiap pelabuhan berfungsi dengan baik dalam praktek akses transportasi perairannya, termasuk memiliki fasilitas pendukung lainnya yang bertaraf nasional di pelabuhannya (Hong Kong Marine Department, 2009).

Pemerintah Hong Kong telah secara aktif mengejar pembangunan ekonomi untuk menjaga keunggulan

kompetitif wilayahnya. Terdapat empat kunci perindustrian di Hong Kong yang menjadi pendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi Hong Kong itu sendiri yaitu: jasa keuangan, pariwisata, perdagangan dan logistik, serta layanan profesional dan produsen, telah menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi Hong Kong. Dengan demikian empat kunci industri ini juga memberikan dorongan untuk pertumbuhan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, industri-industri yang baru muncul seperti industri budaya dan kreatif, layanan medis, layanan pendidikan, inovasi dan teknologi, layanan pengujian dan sertifikasi, dan industri lingkungan, juga telah diidentifikasi sebagai nikmat dari keuntungan untuk pengembangan lebih lanjut .

Industri budaya dan kreatif (CCI) adalah salah satu sektor paling dinamis di Hong Kong, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. CCI terdiri dari seperangkat kegiatan berbasis pengetahuan yang menyebarkan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama dan memberikan barang dan jasa dengan konten budaya, artistik dan kreatif (Hong Kong Census and Statistics Department, 2017).

Hong Kong adalah salah satu wilayah di Asia yang memiliki nilai tukar uang yang lumayan tinggi dan biaya hidup serta akomodasi di Hong Kong sangatlah tinggi berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah di Tiongkok daratan. Namun walaupun tingginya taraf hidup di Hong Kong, sektor-sektor di Hong Kong tetap dapat berkembang dengan pesat, hal ini

ditandai dengan banyaknya pendatang dari negara-negara asing yang berkunjung untuk membeli barang serta berinvestasi di Hong Kong. Sektor-sektor ekonomi Hong Kong berkembang dengan pesat sehingga menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah penguat pembangunan ekonomi Tiongkok dan membantu kemajuan dari wilayah-wilayah bagian Tiongkok lainnya.

KESIMPULAN

Kemajuan sektor-sektor ekonomi Hong Kong mampu menjadi Hong Kong sebagai salah satu ekportir terbesar didunia, ini ditandai dengan banyaknya barang-barang yang ditemui di beberapa negara dengan label *made in Hong Kong*. Hong Kong sangat maju dalam industri pariwisatanya, dimana setiap tahunnya sangat banyak sekali pendatang dari warga negara asing

yang berkunjung untuk berwisata dan berlibur di Hong Kong, industri pariwisata ini sangat didukung oleh pemerintah Hong Kong dikarenakan menjadi salah satu pemasukan terbesarnya.

Integrasi ekonomi Hong Kong dengan Tiongkok daratan terus menjadi hal yang paling nyata di sektor perbankan dan keuangan. Inisiatif seperti *Hong Kong-Shanghai Stock Connect*, *Mutual Recognition of Funds*, dan *Hong Kong Shanghai Gold Connect* adalah semua langkah penting untuk membuka pasar modal Tiongkok daratan dan telah memperkuat peran utama Hong Kong sebagai pasar RMB lepas pantai Tiongkok. Skema sambungan tambahan dari obligasi ke komoditas dan produk investasi lainnya juga sedang dalam eksplorasi oleh otoritas Hong Kong. Sektor perbankan

dan keuangan merupakan sektor yang sangat penting dalam hubungan kerjasama Hong Kong dan Tiongkok daratan, sehingga sektor-sektor keunggukan Hong Kong sangat berpengaruh terhadap ekonomi Tiongkok.

SUMBER :

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik Maret 20, 2018, dari kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/integrasi>
- Chan, H. (2017, May 10). Retrieved October 20, 2017, from <http://www.hkeconomy.gov.hk/en/home/index.htm>
- Chiang, Y. F. (2004). One-China Policy and Taiwan. *Fordham International Law Journal*, 2.
- Guang, L. P. (2012). *Governance of Hong Kong: Enlightenment from Declassified Archives in Great Britain*. Hong Kong: Oxford University Press.
- Guangzhou Daily Luo Hua Lin . (2017, July 10). *Buku Biru Guangzhou: Laporan*

- Perkembangan Ekonomi Guangzhou (2017)*. Dipetik Maret 01, 2018, dari [gzass.gd.cn](http://www.gzass.gd.cn):
<http://www.gzass.gd.cn/content/s/130/8351.html>
- Heritage Foundation. (2017). *Hong Kong*. Retrieved november 22, 2017, from 2017 index of Economic Freedom:
<http://www.heritage.org/index/country/hongkong>
- Hong Kong Census and Statistics Department. (2017, Juni 15). *The Culture and Creative Industries in Hong Kong*. Dipetik Maret 26, 2018, dari Hong Kong Census and Statistics Department:
<https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sp80.jsp?productCode=FA100120>
- Hong Kong Government. (2016). *History*. Dipetik Maret 04, 2018, dari www.yearbook.gov.hk:
<https://www.yearbook.gov.hk/2016/en/pdf/E22.pdf>
- Hong Kong Marine Department. (2009). *Hong Kong Fact Sheet*. Retrieved Maret 22, 2018, from Hong Kong Marine Department:
<https://www.mardep.gov.hk/en/aboutus/hkfactsheet.html>
- Hsieh, P. L. (2009). Legal Challenges with Renewed Momentum: The Taiwan Question and the One-China Policy. *Journal of International Peace and Organization*, 59.
- Hung, A. T. (2015). Philosophical Foundation of Hong Kong Tertiary Civic. *Formation of Trans-Cultural Political Vision*, 65.
- John L. Graham, N. M. (2007). *China Now*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Perdue, P. C. (2011). *The First Opium War: The Anglo-Chinese War of 1839-1842*. Dipetik Maret 03, 2018, dari ocw.mit.edu:
https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_essay01.html
- Sherlock, S. (1997, Juni 23). *Hong Kong and the Transfer to China: Issues and Prospects*. Retrieved Maret 27, 2018, from Foreign Affairs, Defence and Trade Group:
https://www.apf.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9697/97cib33